Birokrasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 02, Juni 2026

BUDAYA ORGANISASI DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN BUMNAG NAGARI BIDAR ALAM

Thirtiwi Fizia Marsa, Lince Magriasti
Universitas Negeri Padang
fiziamarsa13@gmail.com, lincemagriasti@yahoo.com

ABSTRAK

Budaya organisasi merupakan salah satu factor penting dalam mendukung penerapan prinsip good governance Pada lembaga ekonomi masyarakat, termasuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Keberadaan budaya organisasi yang kuat dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya organisasi dalam perspektif good governance serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya pada pengelolaan BUMNag di Nagari Bidari Alam, Kabupaten Solok Selatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dalam pengelolaan BUMNag telah mencerminkan prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, profesionalisme, kejujuran, dan gotong royong. Penerapan nilai-nilai tersebut terlihat dalam penyampaian laporan keuangan secara berkala, pengambilan keputusan secara partisipatif, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan usaha. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena adanya kendala seperti perbedaan pemahaman, belum meratanya tingkat kedisiplinan dan komitmen pengurus, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.
Kata kunci: budaya organisasi, good governance, BUMNag, transparansi, akuntabilitas.

ABSTRACT

Organizational culture is an important factorin supporting the implementation of good governance principles in community-based economic institutions, including Village-Owned Enterprises (BUMNag). A strong organizational culture can influence management effectiveness and public trust. This study aims to analyze organizational culture from a good governance perspective and to identify challenges in its implementation in the management of BUMNag in Nagari Bidari Alam, South Solok Regency. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, with informants selected using purposive sampling.
The findings indicate that organizational culture reflects good governance principles, including transparency, accountability, participation, professionalism, honesty, and

Birokrasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 02, Juni 2026

mutual cooperation. These values are implemented through periodic financial reporting, participatory decision- making, and community involvement.

Keywords: organizational culture, good governance, BUMNag, transparency, accountability.

A. PENDAHULUAN

Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, norma, keyakinan, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu organisasi serta menjadi pedoman bagi anggotanya dalam bertindak dan berinteraksi. Dalam suatu organisasi, budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai kekuatan yang mampu mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku individu dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, budaya organisasi yang kuat dan positif sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja organisasi agar berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan lembaga publik, budaya organisasi memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep good governance. Good governance merupakan suatu prinsip tata kelola yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta penegakan hukum dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Penerapan prinsip ini menjadi sangat penting, terutama pada lembaga yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). BUMNag sebagai lembaga ekonomi nagari memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menghasilkan keuntungan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

BUMNag Nagari Bidari Alam hadir sebagai salah satu upaya pemerintah nagari dalam mengelola potensi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pengelolaan BUMNag sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia serta budaya organisasi yang diterapkan oleh para pengurusnya. Nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kerja sama, dan profesionalisme menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola yang baik.

Budaya organisasi yang mendukung prinsip good governance akan mendorong terciptanya sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif.

Penerapan budaya organisasi dalam BUMNag tidak hanya tercermin dalam dokumen atau aturan formal, tetapi juga dalam praktik sehari-hari, seperti pola komunikasi antar pengurus, proses pengambilan keputusan, serta keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Misalnya, penyampaian laporan keuangan secara berkala, pelibatan masyarakat dalam kegiatan usaha, serta adanya musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan merupakan bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai tersebut. Dengan adanya budaya organisasi yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap BUMNag akan meningkat, sehingga partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan BUMNag juga semakin tinggi.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan budaya organisasi yang berorientasi pada good governance tidak selalu berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti perbedaan tingkat pemahaman antar pengurus terkait prinsip tata kelola yang baik, keterbatasan kompetensi, serta tingkat kedisiplinan dan komitmen yang belum merata. Selain itu, kesibukan masing-masing pengurus dan kurangnya konsistensi dalam menjalankan tugas juga dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan budaya organisasi yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan budaya organisasi masih perlu terus dilakukan melalui peningkatan komunikasi, koordinasi, serta evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, dinamika organisasi yang terus berkembang menuntut adanya penyesuaian dan pembaruan dalam penerapan nilai-nilai organisasi. BUMNag sebagai lembaga yang relatif berkembang masih memerlukan proses pembelajaran dalam membangun sistem tata kelola yang ideal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana budaya organisasi yang ada saat ini mampu mendukung atau justru menghambat penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan BUMNag.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara lebih mendalam mengenai budaya organisasi dalam

perspektif good governance pada pengelolaan BUMNag Nagari Bidari Alam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai nilai-nilai yang dianut, bentuk penerapannya dalam kegiatan sehari-hari, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pengurus BUMNag dalam memperkuat budaya organisasi guna mewujudkan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena budaya organisasi dalam perspektif good governance pada pengelolaan BUMNag, khususnya yang berkaitan dengan nilai, norma, serta praktik yang dilakukan oleh pengurus dalam aktivitas sehari-hari. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait penerapan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dinamika budaya organisasi dalam pengelolaan BUMNag Nagari Bidari Alam.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berada di Nagari Bidari Alam, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BUMNag tersebut merupakan salah satu lembaga ekonomi nagari yang aktif menjalankan kegiatan usaha serta memiliki struktur organisasi yang jelas, sehingga relevan untuk mengkaji budaya organisasi dalam perspektif good governance. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama (dua) bulan, yang mencakup tahap

persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data. Rentang waktu tersebut dianggap memadai untuk memperoleh data yang mendalam dan akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Sumber Data

a. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara mendalam dan observasi lapangan. Informan dalam penelitian ini meliputi pengurus BUMNag, seperti ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota pengelola yang terlibat langsung dalam aktivitas organisasi.

b. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan BUMNag, laporan kegiatan, peraturan nagari, serta literatur lain yang berkaitan dengan budaya organisasi dan good governance. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer.

4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan BUMNag.

Informan utama terdiri dari pengurus inti BUMNag, seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Selain itu, informan pendukung juga melibatkan perangkat nagari serta masyarakat yang mengetahui atau terlibat dalam kegiatan BUMNag. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh benar-benar relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki arah yang jelas, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan informasi secara lebih luas dan mendalam.
b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pengelolaan BUMNag, termasuk interaksi antar pengurus, proses pengambilan keputusan, serta praktik penerapan nilai-nilai organisasi dalam kegiatan sehari-hari. Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat faktual dan kontekstual.
c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen tertulis maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian, seperti laporan keuangan, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik ini digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disusun secara langsung berdasarkan temuan wawancara dengan pengurus BUMNag Nagari Bidari Alam. Pembahasan disajikan secara sistematis sesuai dengan fokus pertanyaan penelitian, sehingga mencerminkan kondisi empiris di lapangan serta relevan dengan prinsip good governance.

1. Nilai-Nilai Utama dalam Pengelolaan BUMNag

Berdasarkan hasil wawancara, nilai-nilai utama yang menjadi pedoman pengurus dalam menjalankan BUMNag meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif, profesionalisme, kejujuran, serta semangat gotong royong. Nilai-nilai

ini telah menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan interaksi antar pengurus.

Dalam perspektif good governance, nilai-nilai tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip tata kelola yang baik. Transparansi dan akuntabilitas mencerminkan keterbukaan dan tanggung jawab, sedangkan partisipatif dan gotong royong menunjukkan adanya keterlibatan kolektif dalam organisasi. Dengan demikian, secara normatif BUMNag telah memiliki fondasi budaya organisasi yang mendukung tata kelola yang baik.

2. Penerapan Nilai dalam Aktivitas Pengelolaan Sehari-hari

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam beberapa aktivitas, seperti penyampaian laporan keuangan secara berkala, pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan usaha. Selain itu, pengurus juga berupaya memberikan pelayanan yang adil dan mengelola usaha secara profesional.

Namun demikian, implementasi nilai tersebut belum sepenuhnya konsisten. Masih terdapat kondisi di mana sebagian pengurus belum optimal dalam menjalankan perannya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai organisasi masih berada pada tahap penguatan, khususnya dalam aspek konsistensi dan kedisiplinan.

3. Pola Komunikasi dan Kerja Sama Antar Pengurus

Pola komunikasi dalam organisasi dilakukan melalui rapat formal dan komunikasi informal. Rapat digunakan sebagai media utama dalam membahas kegiatan dan pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi informal mendukung kelancaran koordinasi sehari-hari. Kerja sama antar pengurus dinilai cukup baik, yang terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas serta sikap

saling menghargai. Dalam konteks organisasi, kondisi ini menunjukkan adanya hubungan kerja yang kooperatif. Meskipun demikian, peningkatan koordinasi tetap diperlukan agar seluruh pengurus memiliki tingkat keterlibatan yang merata.

4. Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam BUMNag dilakukan melalui musyawarah mufakat. Setiap pengurus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan diambil. Mekanisme ini mencerminkan prinsip partisipatif dalam good governance. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah memiliki legitimasi yang kuat karena melibatkan seluruh pengurus. Namun, dalam praktiknya, efektivitas musyawarah masih dipengaruhi oleh tingkat keaktifan individu, sehingga kualitas partisipasi belum sepenuhnya merata.

5. Transparansi dalam Pengelolaan BUMNag

Bentuk transparansi dalam pengelolaan BUMNag terlihat dari penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah nagari dan masyarakat secara berkala. Selain itu, informasi terkait kegiatan usaha juga disampaikan secara terbuka melalui forum rapat maupun media komunikasi lainnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan BUMNag. Namun, dari sisi pelaksanaan, transparansi masih perlu ditingkatkan agar lebih sistematis dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

6. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Pengurus

Tanggung jawab pengurus tercermin dari pelaksanaan tugas sesuai dengan peran masing-masing serta penyusunan laporan kegiatan dan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pengurus juga berupaya menjaga aset dan keberlangsungan usaha BUMNag.

Dalam perspektif good governance, kondisi ini menunjukkan adanya penerapan akuntabilitas. Namun demikian, kualitas pertanggungjawaban masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konsistensi pelaporan dan evaluasi kinerja secara berkala.

7. Kedisiplinan dan Komitmen Pengurus

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan dan komitmen pengurus tergolong cukup baik, yang ditandai dengan kehadiran dalam rapat dan keterlibatan dalam kegiatan usaha. Namun, masih terdapat beberapa pengurus yang kurang aktif atau belum konsisten dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi belum sepenuhnya terinternalisasi secara merata. Kedisiplinan dan komitmen menjadi aspek penting yang perlu diperkuat untuk mendukung efektivitas pengelolaan BUMNag.

8. Peran Budaya Organisasi dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Budaya organisasi dalam BUMNag mendorong penerapan transparansi dan akuntabilitas melalui pembiasaan sikap terbuka, jujur, serta adanya kesadaran terhadap tanggung jawab. Selain itu, pengawasan internal juga menjadi faktor pendukung dalam menjaga konsistensi pelaksanaan nilai-nilai tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola yang baik. Nilai-nilai yang diterapkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi pedoman dalam perilaku organisasi.

9. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Partisipasi Masyarakat

Budaya organisasi yang baik terbukti mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMNag. Kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang dijalankan.

Dengan demikian, budaya organisasi tidak hanya berdampak pada aspek internal, tetapi juga berpengaruh terhadap hubungan eksternal organisasi dengan masyarakat. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan BUMNag.

10. Kendala dalam Penerapan Budaya Organisasi

Dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu perbedaan pemahaman antar pengurus, keterbatasan pengalaman, serta kesibukan masing-masing individu yang mempengaruhi tingkat keaktifan. Selain itu, penerapan transparansi dan akuntabilitas masih memerlukan penyesuaian agar dapat dilakukan secara konsisten.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa proses penguatan budaya organisasi masih berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan komunikasi, koordinasi, serta evaluasi organisasi secara berkala.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dalam pengelolaan BUMNag Nagari Bidari Alam pada dasarnya telah mengarah pada penerapan prinsip good governance. Hal ini ditunjukkan oleh adanya nilai-nilai utama yang dianut oleh pengurus, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, profesionalisme, kejujuran, dan gotong royong, yang telah menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas organisasi. Penerapan nilai-nilai tersebut telah terlihat dalam praktik pengelolaan sehari-hari, seperti penyampaian laporan keuangan secara berkala, pelaksanaan tugas sesuai dengan struktur organisasi, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan usaha. Pola komunikasi yang terjalin melalui rapat dan interaksi informal juga mendukung terciptanya kerja sama yang cukup baik antar pengurus. Selain itu, proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui

musyawarah mufakat mencerminkan adanya penerapan prinsip partisipatif dalam organisasi.

Dari aspek transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan BUMNag telah menunjukkan adanya upaya keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban kepada pemerintah nagari dan masyarakat. Budaya organisasi yang diterapkan juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga mendorong partisipasi dalam mendukung kegiatan BUMNag.

Namun demikian, penerapan budaya organisasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat beberapa kendala, seperti belum meratanya tingkat kedisiplinan dan komitmen pengurus, perbedaan pemahaman, serta keterbatasan pengalaman dan waktu yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kondisi ini berdampak pada belum konsistennya penerapan nilai-nilai organisasi dalam kegiatan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dalam pengelolaan BUMNag Nagari Bidari Alam telah mencerminkan prinsip good governance, tetapi masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek konsistensi pelaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem organisasi. Upaya tersebut penting dilakukan agar tata kelola BUMNag dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). The new public service: Serving, not steering. M.E. Sharpe.

Dwiyanto, A. (2015). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.

Fitriani, R. (2020). Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi dalam perspektif good governance. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 112–120.

Hidayat, A., & Putri, D. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 45–56.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jakarta.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jakarta.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Ndraha, T. (2011). Kybernology (ilmu pemerintahan baru). Rineka Cipta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.

Pratama, Y. (2019). Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Governance, 4(3), 77–89.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational behavior (17th ed.). Pearson Education Limited.

Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (4th ed.). Jossey-Bass.

Sedarmayanti. (2012). Good governance (kepemerintahan yang baik) dan good corporate governance. Mandar Maju.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suharto, E. (2014). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Refika Aditama.

United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. UNDP.